

Peranan Kampung KB dalam pengendalian angka kelahiran di Kota Pangkalpinang Provinsi Bangka Belitung

Arnold Poli^{a,1}, Piet Hein Pusung^{b,2}, Nayunda Rahmi Pratiwi^{c,3}, Lady Grace Jane Giroth^{c,4}

^{abc} Institut Pemerintahan Dalam Negeri

^d Universitas Teknologi Sulawesi Utara

* Corresponding Author: ladygiroth@utsu.ac.id

INFO ARTIKEL

Sejarah Artikel:

Diterima: 10 April 2024

Direvisi: 16 Mei 2024

Disetujui: 1 Juni 2024

Tersedia Daring: 17 Juni 2024

Kata Kunci:

Pertumbuhan penduduk

Indonesia,

Kampung Keluarga

Berkualitas,

Pengendalian kelahiran

ABSTRAK

Pertumbuhan penduduk Indonesia telah menjadi perhatian utama karena dampaknya terhadap berbagai aspek kehidupan. Dengan penduduk mencapai angka 275,77 juta jiwa pada pertengahan 2022, laju pertumbuhan menurun menjadi 1,17 persen. Fenomena ini menjadi perhatian serius bagi pemerintah, terutama dengan kepadatan penduduk mencapai 143,86 orang/km². Di tengah upaya menangani pertumbuhan tidak terkontrol, Kota Pangkalpinang sebagai contoh menunjukkan peningkatan signifikan dalam jumlah penduduk. Untuk menangani masalah ini, pemerintah memperkenalkan Kampung Keluarga Berkualitas (Kampung KB) sebagai program pengendalian kelahiran. Melalui Kampung KB, masyarakat diberikan edukasi tentang perencanaan keluarga yang bijak dan pentingnya keluarga berkualitas. Program ini juga memberikan dukungan bagi pasangan yang ingin merencanakan keluarga dengan memberikan informasi, konseling, dan bimbingan terkait berbagai aspek keluarga berencana. Diharapkan, melalui upaya ini, angka kelahiran dapat dikendalikan dengan baik, yang pada gilirannya akan meningkatkan kualitas hidup keluarga dan individu serta mengurangi angka kelahiran yang tidak terencana.

ABSTRACT

Keywords:

Indonesian population growth,

Family Quality Village,

Birth control

Indonesia's population growth has become a major concern due to its impact on various aspects of life. With the population reaching 275.77 million people in mid-2022, the growth rate decreased to 1.17 percent. This phenomenon is a serious concern for the government, especially with population density reaching 143.86 people/km². Amidst efforts to address uncontrolled growth, Pangkalpinang City as an example shows a significant increase in population. To address this issue, the government introduced the Family Quality Village (Kampung KB) as a birth control program. Through Kampung KB, communities are educated about wise family planning and the importance of quality families. The program also provides support for couples who want to plan a family by providing information, counseling, and guidance related to various aspects of family planning. It is hoped that, through these efforts, the birth rate can be well controlled, which in turn will improve the quality of life of families and individuals and reduce the number of unplanned births.

©2024, Authors Arnold Poli, Piet Hein Pusung, Nayunda Rahmi Pratiwi, Lady Grace Jane Giroth

This is an open access article under CC BY-SA license



1. Pendahuluan

Pertumbuhan penduduk Indonesia telah menjadi sorotan utama, khususnya dengan mencapai peringkat ke-4 di dunia berdasarkan jumlahnya. Pada pertengahan 2020, jumlah

penduduk Indonesia mencapai 270,2 juta jiwa, yang kemudian naik menjadi 272,68 juta jiwa pada pertengahan 2021, dan terus meningkat menjadi 275,77 juta jiwa hingga pertengahan 2022. Namun, data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa laju pertumbuhan penduduk Indonesia terus menurun setiap tahun sejak 2020, dengan angka mencapai 1,17 persen pada tahun 2022.

Fenomena pertumbuhan populasi yang tinggi telah mengakibatkan perhatian serius dari pemerintah, terutama karena berdampak pada berbagai aspek kehidupan, baik secara ekonomi maupun sosial. Hal ini memunculkan keprihatinan karena meningkatnya kepadatan penduduk yang mencapai 143,86 orang per kilometer persegi. Terutama di Indonesia, masalah ini lebih kompleks karena kepadatan penduduk yang tinggi dipengaruhi oleh pertumbuhan yang cepat, mengakibatkan piramida penduduk yang cenderung ekspansif, dengan mayoritas penduduk berusia muda.

Dalam mengatasi tantangan ini, pemerintah mengambil langkah-langkah konkret, salah satunya melalui program Kampung Keluarga Berkualitas (Kampung KB) yang bertujuan untuk mengendalikan pertumbuhan kelahiran. Program ini bertujuan untuk memberikan edukasi kepada masyarakat tentang perencanaan keluarga yang bijak serta memberikan dukungan bagi pasangan yang ingin merencanakan keluarga. Melalui Kampung KB, diharapkan angka kelahiran dapat dikelola dengan baik, memberikan dampak positif pada kualitas hidup keluarga dan individu, serta mengurangi kelahiran yang tidak terencana.

2. Kajian Teoretis

Teori peran (*role theory*) adalah kerangka konseptual yang berakar dari berbagai disiplin ilmu seperti psikologi, sosiologi, dan antropologi. Istilah "peran" itu sendiri diambil dari dunia teater, di mana seorang aktor harus memerankan tokoh tertentu dengan perilaku yang sesuai. Konsep ini diperluas dan diterapkan dalam konteks sosial untuk memahami bagaimana individu atau kelompok berperilaku dalam berbagai situasi.

Dalam penjelasan dimensi peran oleh Horoepoetri, Arimbi, dan Santosa, peran memiliki beberapa aspek. Pertama, peran dianggap sebagai kebijakan yang memerlukan kebijaksanaan dan pelaksanaan yang baik. Kedua, peran dianggap sebagai strategi untuk mendapatkan dukungan sosial dengan menunjukkan kredibilitas keputusan. Ketiga, peran digunakan sebagai alat komunikasi untuk mengumpulkan masukan dan informasi dari masyarakat.

Soekanto menambahkan dimensi baru dalam pemahaman tentang peran, khususnya dalam konteks sosial. Ia menegaskan bahwa peran seseorang dalam masyarakat tidak hanya merupakan posisi statis, tetapi bersifat dinamis. Peran seseorang juga berkaitan dengan konsep kekuasaan dan wewenang, menunjukkan bahwa peran sering kali berkorelasi dengan tingkat kekuasaan yang dimiliki individu dalam masyarakat.

Selain itu, peran seseorang juga dapat mencakup berbagai aspek dalam kehidupan sosialnya. Soekanto menjelaskan bahwa peran dapat diwajibkan untuk mempertahankan keberlangsungan hidup masyarakat, mendorong pelaksanaan struktur keberlangsungan hidup, dan memenuhi proses bermasyarakat dengan mempertimbangkan kepentingan masyarakat.

Program Kampung Keluarga Berkualitas (KB) merupakan implementasi dari teori peran dalam konteks nyata. Kampung KB bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui integrasi berbagai program pembangunan, termasuk program Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga (KKBPK). Melalui Kampung KB, pemerintah berharap dapat memperkuat peran dan tanggung jawab keluarga dalam membentuk masyarakat yang lebih berkualitas.

3. Metode

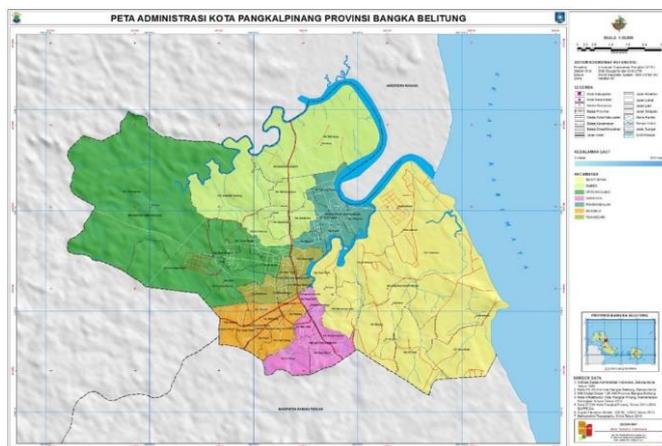
Pendekatan penelitian merupakan landasan penting bagi seorang peneliti dalam menghadapi suatu topik. Melalui serangkaian kegiatan pengamatan, penelitian, dan analisis, peneliti dapat menghasilkan solusi atau cara penyelesaian masalah yang diteliti. Hillway (1956) menggambarkan penelitian sebagai suatu metode studi yang mengharuskan peneliti untuk melakukan analisis komprehensif terhadap suatu masalah guna memperoleh jawaban yang tepat. Tujuan dari penelitian sendiri dapat bervariasi, seperti yang dijelaskan oleh Sugiyono (2016), yakni untuk menemukan pengetahuan baru, membuktikan kebenaran suatu informasi, atau mengembangkan pemahaman lebih lanjut terhadap suatu fenomena. Dalam konteks ini, metodologi penelitian memainkan peran penting sebagai panduan bagi peneliti dalam menentukan langkah-langkahnya selanjutnya. Metode penelitian yang dipilih, seperti penelitian deskriptif kualitatif, memberikan landasan yang kokoh bagi peneliti untuk memahami fenomena yang terjadi dan merangkumnya secara sistematis.

Instrumen penelitian, sebagai alat bantu bagi peneliti, juga memiliki peran yang tidak kalah pentingnya. Instrumen tersebut memungkinkan peneliti untuk mengukur kejadian atau fenomena alam dan sosial yang diamati, seperti yang dijelaskan oleh Sugiyono (2015) dan Gulo (2000). Dalam penelitian kualitatif, peneliti sendiri menjadi instrumen utama, yang memerlukan keterampilan dalam menetapkan fokus penelitian, memilih informan, mengumpulkan data, menganalisis, dan membuat kesimpulan. Teknik pengumpulan data yang digunakan, seperti observasi, wawancara, dan dokumentasi, memberikan peneliti akses yang lebih mendalam terhadap fenomena yang diteliti. Dengan menggunakan pendekatan induktif dalam teknik analisis data, peneliti dapat menyederhanakan, menyajikan, dan menarik kesimpulan dari data yang terkumpul secara sistematis. Dengan demikian, penelitian dapat menghasilkan pemahaman yang lebih mendalam terhadap peran Kampung KB dalam pengendalian angka kelahiran di Kota Pangkalpinang.

4. Hasil dan Pembahasan

Kota Pangkalpinang merupakan ibukota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang memiliki luas wilayah $\pm 104,405$ km². Apabila dibandingkan dengan luas provinsi, luas Kota Pangkalpinang hanya sebesar 0,72% dari total keseluruhan luas wilayah provinsi dan merupakan wilayah kota/kabupaten terkecil di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Peta Administrasi Kota Pangkalpinang



Sumber: Pemerintah Kota Pangkalpinang

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2019, batas daerah Kota Pangkalpinang dengan Kabupaten Bangka dan Kabupaten Bangka Tengah Provinsi

Kepulauan Bangka Belitung secara jelas diatur. Kota Pangkalpinang memiliki batas wilayah sebelah utara dengan Kecamatan Merawang (Kabupaten Bangka), sebelah timur dengan Selat Karimata, sebelah selatan dengan Kecamatan Pangkalanbaru (Kabupaten Bangka Tengah), dan sebelah barat dengan Mendo Barat (Kabupaten Bangka). Pembentukan Kota Pangkalpinang sendiri diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, yang kemudian diikuti oleh pembentukan beberapa kabupaten di provinsi tersebut, termasuk Kabupaten Bangka Selatan, Bangka Tengah, Bangka Barat, dan Belitung Timur berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003. Dengan demikian, wilayah administrasi pemerintahan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terbagi menjadi enam kabupaten dan satu kota, dengan Kota Pangkalpinang sebagai ibukotanya yang terdiri dari 7 kecamatan dan 42 kelurahan.

Luas Wilayah Menurut Kecamatan di Kota Pangkalpinang Tahun 2022

NO	Kecamatan	Luas wilayah (Km2)	Luas Wilayah (%)	Jumlah Kelurahan
1.	Rangkui	5.011	5	8
2.	Bukit Intan	35.680	34	7
3.	Girimaya	4.347	4	5
4.	Pangkalbalam	4.723	4	5
5.	Gabek	20.393	20	6
6.	Tamansari	3.190	3	5
7.	Gerunggang	31.143	30	6
Total		104,405	100	42

Sumber: BPS Kota Pangkalpinang tahun 2023

Berdasarkan data dari tabel 4.1 diatas diketahui bahwa Bukit Intan merupakan wilayah kecamatan terluas yang ada di Kota Pangkalpinang dan Taman Sari menjadi kecamatan dengan wilayah terkecil. Luas wilayah yang ada di tiap kecamatan Kota Pangkalpinang mempengaruhi tingkat kepadatan penduduk di wilayah tersebut.

Berdasarkan kondisi geografisnya, wilayah Kota Pangkalpinang dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu wilayah daratan dan wilayah lautan. Kota Pangkalpinang terletak di Pulau Bangka, salah satu dari dua pulau besar di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang juga dikenal dengan ratusan pulau kecilnya. Secara astronomis, Kota Pangkalpinang terletak antara 02°03' –02°10' Lintang Selatan dan 106°02' – 106°12' Bujur Timur.

Dilihat dari sudut geografisnya, Kota Pangkalpinang memiliki kepentingan strategis dalam konteks pembangunan nasional dan provinsi. Sebagai ibukota provinsi, Kota Pangkalpinang berfungsi sebagai pusat pengembangan pembangunan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Perkembangan fisik Kota Pangkalpinang, yang merupakan pusat pengembangan wilayah bagi Provinsi Bangka Belitung, telah mengalami kemajuan yang pesat dalam beberapa tahapan pembangunan. Hal ini menunjukkan pentingnya Kota Pangkalpinang dalam dinamika pembangunan di wilayah tersebut.

Jumlah Penduduk Kota Pangkalpinang Menurut Kecamatan Tahun 2019 - 2022

No	Kecamatan	2019	2020	2021	2022
1.	Rangkui	38.724	35.703	36.261	39.965
2.	Bukit Intan	38.318	41.343	41.990	42.805

3.	Girimaya	19.237	18.129	18.413	18.770
4.	Pangkalbalam	22.567	22.141	22.488	22.925
5.	Gabek	31.482	35.013	35.561	36.251
6.	Tamansari	21.283	18.473	18.762	19.126
7.	Gerunggang	43.768	47.766	48.513	49.455
Total		215.379	218.568	221.988	226.297

Sumber: BPS Kota Pangkalpinang, 2023

Berdasarkan data dari BPS, jumlah penduduk Kota Pangkalpinang pada tahun 2022 mencapai 226.297 jiwa. Komposisi penduduk didominasi oleh laki-laki, mengungguli jumlah penduduk perempuan di kota tersebut. Laju pertumbuhan penduduk Kota Pangkalpinang dari tahun 2020 hingga 2022 mencapai 2,01%. Analisis data per kecamatan menunjukkan bahwa dari total 7 kecamatan, 6 kecamatan menunjukkan laju pertumbuhan penduduk yang positif, sementara 1 kecamatan lainnya menunjukkan laju pertumbuhan yang negatif.

**Laju Pertumbuhan Penduduk Kota Pangkalpinang
Per Kecamatan Tahun 2020 - 2022**

No	Kecamatan	Laju Pertumbuhan (%)	
		2020-2021	2020-2022
1.	Rangkui	1,02	0,41
2.	Bukit Intan	1,02	2,01
3.	Girimaya	1,02	2,01
4.	Pangkalbalam	1,02	2,01
5.	Gabek	1,02	2,01
6.	Tamansari	1,02	2,01
7.	Gerunggang	1,02	2,01
Jumlah		1,02	2,01

Sumber: BPS Kota Pangkalpinang, 2023

Kepadatan penduduk Kota Pangkalpinang pada Tahun 2022 sebesar 2.165 jiwa per km². Kecamatan dengan kepadatan penduduk tertinggi yaitu Kecamatan Rangkui sebesar 7.377 jiwa per km² sedangkan kepadatan terkecil berada di Kecamatan Bukit Intan yang hanya mencapai 1.200 jiwa per km², secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut:

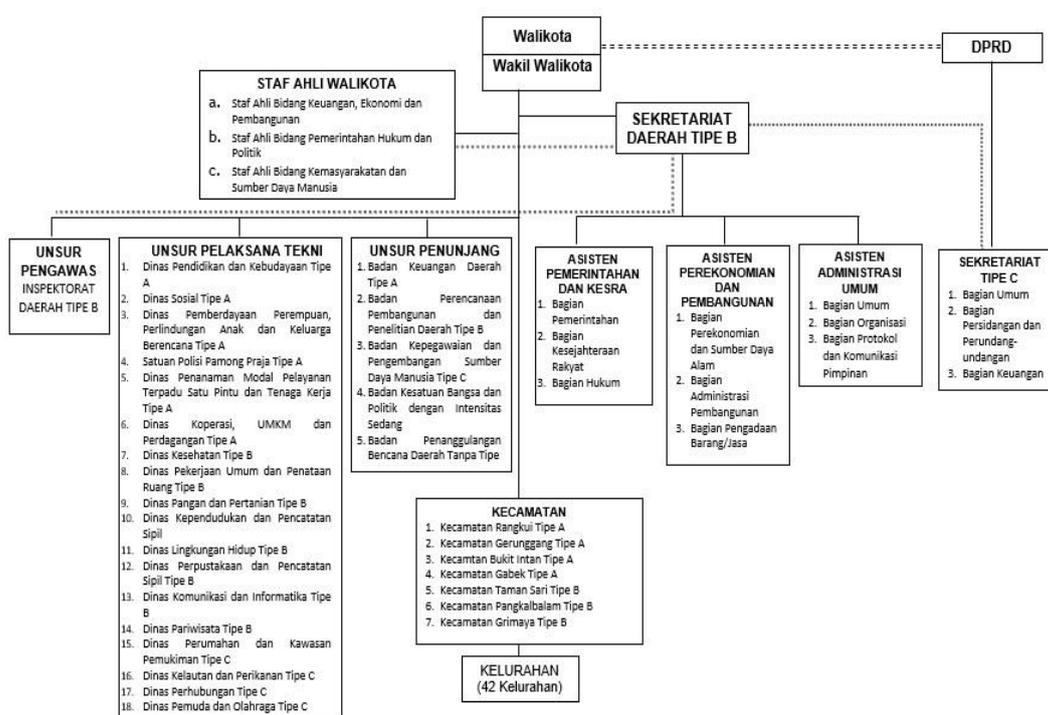
**Kepadatan Penduduk Kota Pangkalpinang Per Kecamatan
Tahun 2022**

No	Kecamatan	Luas Wilayah (Km ²)	Kepadatan Penduduk (Per Km ²)
1.	Rangkui	5.011	7.377
2.	Bukit Intan	35.680	1.200
3.	Girimaya	4.347	4.318
4.	Pangkalbalam	4.723	4.834
5.	Gabek	20.393	1.772
6.	Tamansari	3.190	5.949
7.	Gerunggang	31.143	1.591
Kota Pangkalpinang		104.405	2.165

Sumber: BPS Kota Pangkalpinang, 2023

Pemerintahan Kota Pangkalpinang, sebagai ibu kota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dipimpin oleh seorang walikota, Bapak H. Maulan Aklil, S.IP, M.Si, dengan bantuan administratif dari Wakil Walikota, Bapak Muhammad Sopian, AP, dan Sekretaris Daerah yang mengawasi tiga asisten dengan tugas khusus. Dalam merencanakan pembangunan kota, walikota menetapkan visi pembangunan jangka menengah yang menggambarkan kondisi masyarakat yang sejahtera, nyaman, unggul, dan makmur, disebut sebagai Kota SENYUM (Sejahtera Nyaman Unggul Makmur). Visi ini diwujudkan melalui lima misi, termasuk peningkatan pemanfaatan potensi ekonomi, peningkatan kualitas keamanan dan tata kelola pemerintahan, serta peningkatan kualitas infrastruktur dan lingkungan hidup. Untuk mencapai visi dan misi ini, koordinasi dan kerja sama dari seluruh organisasi perangkat daerah penting dan diatur melalui Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang.

Bagan SOTK Pemerintah Kota Pangkalpinang



Sumber Data: Pemerintah Kota Pangkalpinang.

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Pangkalpinang memiliki struktur organisasi dan tata kerja yang diatur berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 1 Tahun 2020 dan Peraturan Walikota Nomor 50 Tahun 2021. Struktur organisasi tersebut diperlukan untuk mengendalikan angka kelahiran dengan efektif, dengan tujuan agar setiap individu dalam dinas tersebut memiliki tanggung jawab yang jelas sesuai dengan kewenangannya. Susunan organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Pangkalpinang mencakup berbagai jabatan dan unit kerja yang terperinci dalam Bagan SOTK.

Tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DPPPAKB) Kota Pangkalpinang sesuai dengan Peraturan Walikota Nomor 50 Tahun 2021 meliputi perumusan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan, dan penyelenggaraan urusan di bidang tersebut. DPPPAKB bertanggung jawab dalam berbagai aspek, seperti pengendalian penduduk, penyuluhan, pemberdayaan masyarakat, dan

pengembangan teknologi tepat guna. Setiap jabatan dalam DPPPAKB memiliki tugas dan fungsi yang spesifik sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Hasil penelitian mengenai peran Kampung Keluarga Berkualitas (KB) dalam pengendalian angka kelahiran di Kota Pangkalpinang, Provinsi Bangka Belitung, menunjukkan bahwa Kampung KB memiliki peran strategis dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat di tingkat kampung/dusun/rukun warga. Kebijakan terkait Kampung KB di Kota Pangkalpinang didasarkan pada peraturan daerah dan kebijakan gubernur yang menetapkan wilayah Kampung KB di setiap kelurahan. Hal ini mencerminkan komitmen pemerintah dalam mengontrol angka kelahiran melalui pendekatan yang terstruktur dan terukur.

Klasifikasi Wilayah Kampung KB

No	KECAMATAN	KAMPUNG KB	KELURAHAN	KLASIFIKASI
1	BUKITINTAN	SELAWAN	Semabung Lama	Berkelanjutan
		DENPASAR	Pasir Putih	Berkembang
		PELIKAS	Temberan	Berkembang
		CERMAT	Sinar Bulan	Berkembang
		CIKAR	Air Mawar	Berkembang
		BEDELEW	Air Itam	Berkembang
		BACANG MANIS	Bacang	Berkembang
	JUMLAH		7	
2	TAMAN SARI	GENAS	Gedung Nasional	Berkembang
		OPIN	Opas Indah	Berkelanjutan
		PELIPUR	Rawa Bangun	Berkembang
		BATIN TIKAL	Batin Tikal	Berkembang
	JUMLAH		4	
3	PANGKAL BALAM	LOPAN	Lontong Pancur	Berkembang
		MENTARI	Ketapang	Berkelanjutan
		MANDIRI	Rejosari	Berkembang
		AMPUI	Ampui	Berkembang
		PASIR GARAM	Pasir Garam	Berkembang
	JUMLAH		5	
4	RANGKUI	SEPRADIK	Parit Lalang	Berkelanjutan
		PARLA		
		MASJID JAMIK	Masjid Jamik	Berkembang
		PINTU AIR	Pintu Air	Berkelanjutan
		GAJAH MADA	Gajah Mada	Berkembang
		KERAMAT	Keramat	Berkembang
		BINTANG	Bintang	Berkembang
	JUMLAH		6	
5	GERUNGGANG	TUA TUNU	Tua Tunu	Berkembang
		INDAH		
		AK7	Air Kepala Tujuh	Mandiri
		KASIH BUNDA	Kacang Pedang	Berkembang

		BUKIT SARI	Bukit Sari	
		TAMBUN	Taman Bunga	
		BUMER	Bukit Merapin	Berkembang
	JUMLAH		6	
6	GABEK	CAHAYA	Jerambah Gantung	Berkembang
		CEMPAKA	Gabek 2	Berkembang
		MAWAR	Gabek 1	
		TELANG	Air Salemba	
		SELAMA	Selindung	
		SELIBER	Selindung Baru	Berkembang
	JUMLAH		6	
7	GIRIMAYA	SEMBARU	Semabung Baru	Mandiri
		INTAN	Batu Intan	Berkembang
		SRIWIJAYA	Sriwijaya	
		BUKIT BESAR	Bukit Besar	
		PASAR PADI	Pasar Padi	
	JUMLAH		5	
	TOTAL		39	

Sumber Data: Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Pangkalpinang.

Perhatian yang cukup terhadap program pengendalian angka kelahiran seperti program Kampung KB. Hal ini menjadi hambatan dalam upaya menurunkan angka kelahiran di Kota Pangkalpinang. Selain itu, kebutuhan ekonomi juga menjadi faktor yang menghambat partisipasi masyarakat dalam program Kampung KB. Ketika masyarakat terkonsentrasi pada pemenuhan kebutuhan ekonomi, mereka cenderung mengabaikan program-program sosial yang tidak memberikan manfaat ekonomi langsung. Penulis melakukan wawancara dengan ibu Herlina selaku Ketua PKK Kota Pangkalpinang pada tanggal 20 Januari 2024, beliau mengatakan bahwa:

Kehidupan ekonomi masyarakat menjadi faktor utama yang menghambat partisipasi dalam program Kampung KB. Banyak masyarakat yang lebih fokus pada memenuhi kebutuhan ekonomi sehari-hari daripada mengikuti program-program sosial seperti Kampung KB. Hal ini menjadi hambatan dalam upaya menurunkan angka kelahiran di Kota Pangkalpinang.

Selanjutnya, kendala administratif juga menjadi faktor yang menghambat dalam pelaksanaan program Kampung KB. Proses administrasi yang rumit dan panjang dapat membuat masyarakat kehilangan minat dan kesabaran dalam mengikuti program tersebut. Penulis melakukan wawancara dengan bapak Amirudin selaku Ketua RT di Kelurahan Ketapang pada tanggal 21 Januari 2024, beliau mengatakan bahwa :

Proses administrasi yang rumit seringkali membuat masyarakat menjadi malas untuk mengikuti program Kampung KB. Terkadang, proses administrasi yang berbelit-belit membuat masyarakat kehilangan minat dan kesabaran dalam mengikuti program tersebut. Hal ini menjadi kendala dalam upaya menurunkan angka kelahiran di Kota Pangkalpinang.

Dari wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa kendala administratif menjadi salah satu faktor utama yang menghambat partisipasi masyarakat dalam program Kampung KB. Proses administrasi yang rumit dan panjang membuat masyarakat kehilangan minat dan kesabaran dalam mengikuti program tersebut. Selain itu, kebutuhan ekonomi juga menjadi

faktor yang menghambat partisipasi masyarakat dalam program Kampung KB. Ketika masyarakat terkonsentrasi pada pemenuhan kebutuhan ekonomi, mereka cenderung mengabaikan program-program sosial yang tidak memberikan manfaat ekonomi langsung. Hal ini menjadi hambatan dalam upaya menurunkan angka kelahiran di Kota Pangkalpinang.

5. Kesimpulan

Berdasarkan analisis data yang telah dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana di Kota Pangkalpinang, dapat disimpulkan bahwa peran Kampung KB dalam pengendalian angka kelahiran memiliki dimensi kebijakan, strategi, dan komunikasi. Meskipun peran sebagai kebijakan dan strategi telah dijalankan dengan optimal, terbukti dari penetapan wilayah Kampung KB tingkat Kota Pangkalpinang dan strategi yang dibuat melalui program Kampung KB, namun peran sebagai alat komunikasi masih belum terlaksana dengan baik. Hal ini disebabkan oleh ketidakmauan sebagian masyarakat untuk menerima edukasi serta pemahaman yang masih belum maksimal mengenai Kampung KB. Selain itu, hambatan lainnya adalah adanya perbedaan pemikiran, adat istiadat, dan pemahaman di setiap lingkungan masyarakat, yang membuat sulit untuk merubah pola pikir dan perilaku terkait pengendalian angka kelahiran.

Dalam rangka mengatasi permasalahan tersebut, penulis memberikan beberapa saran. Pertama, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana diharapkan dapat melakukan sosialisasi yang lebih dalam lagi terkait Kampung KB kepada masyarakat dengan memperkuat kerjasama dengan stakeholder terkait. Kedua, penting untuk meningkatkan edukasi kepada masyarakat tentang dampak tingginya angka kelahiran dan pentingnya program Kampung KB sebagai upaya pengendalian. Terakhir, Dinas tersebut juga diharapkan dapat memaksimalkan program Kampung KB dengan memperluas kerjasama dengan berbagai pihak lainnya, sehingga upaya pengendalian angka kelahiran dapat berjalan lebih efektif lagi.

6. Daftar Pustaka

- Miles, B. Mathew & M. Huberman. 1992. *Analisis Data Kualitatif Buku Sumber Tentang Metode-metode Baru*. Jakarta: UIP.
- Miles, Quinn dkk. 1984. *Managing Human Assets*. New York: The Free Press.
- Moleong, Lexy J. 2004. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja. Rosdakarya.
- Moleong, Lexy J. 2006. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja. Rosdakarya.
- Moleong, Lexy J. 2011. *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Moleong, Lexy J. 2013. *Metode Penelitian Kualitatif. Edisi Revisi*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Nazir, Moh. 2014. *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Riduwan. 2010. *Skala Pengukuran Variabel-variabel Penelitian*. Bandung: Alfabeta.
- Riva'i, Andi Kardian. 2016. *Komunikasi Sosial Pembangunan; Tinjauan Teori Komunikasi Dalam Pembangunan Sosial*. Pekanbaru: Hawa Dan Ahwa.
- Sarwono, Sarlito Wirawan. 2002. *Psikologi Sosial*. Jakarta: Balai Pustaka
- Soerjono Soekanto, 2005, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Rajawali, Rajawali Press, Jakarta
- Sugiyono. 2007. *Metodologi Penelitian Bisnis*. Jakarta: PT. Gramedia.

- Sugiyono. 2012. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta. 46
- Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods)*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2019. *Statistika untuk Penelitian*. Bandung: CV Alfabeta.
- Sukandarrumidi. 2006. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Pers UGM.
- Sukmadinata, N. Syaodih. 2009. *Metode penelitian Pendidikan*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga
- Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2012 tentang Percepatan Pengendalian Penduduk dan Pembangunan Keluarga Berencana
- Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2019 tentang Percepatan Pengendalian Pertumbuhan Penduduk dan Pembangunan Keluarga Berencana
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 89 Tahun 2014 tentang Keluarga Berencana
- Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi
- Andhika, M. A. 2022. Peranan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Dalam Melaksanakan Program Kampung KB di Kota Palembang. Skripsi (Doctoral dissertation, Institut Pemerintahan Dalam Negeri).
- Nugroho, Yoga Dwi. 2023. *Inovasi Program Kios Pelayanan Dukcapil Selina Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung Timur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung*. Other Thesis, Institut Pemerintahan Dalam Negeri.
- Ridwansyah, Ivan. 2022. *Peran Satlinmas Dalam Menjaga Keamanan Dan Ketertiban Umum Di Kecamatan Jatinangor*. Diploma Thesis, Institut Pemerintahan Dalam Negeri.
- Saputra, R., & Effendi, L. M. 2019. Pembentukan Kampung Keluarga Berencana dalam Pengendalian Angka Kelahiran Di Kabupaten Karawang. *Jurnal Registratie*, 1(01), 37-60.
- <https://anyflip.com/uokzw/kjqu/> (diakses pada tanggal 28 November 2023)
- <https://anyflip.com/kqpab/chuw/> (diakses pada tanggal 28 November 2023)
- <https://bangka.tribunnews.com/2017/10/31/kota-pangkalpinang-canangkan-kampung-kb> (diakses pada tanggal 10 Oktober 2023)
- <https://kampungkab.bkkbn.go.id/kampung/1543/mentari> (diakses pada tanggal 11 Oktober 2023)
- <https://serumpun.babelprov.go.id/baru-provinsi-babel-yang-dirikan-kampung-kb> (diakses ppada tanggal 5 Oktober 2023)